

MENGUNGKAP KISAH TERSEMBUNYI: KARANTINA HAJI DI PULAU ONRUST 1911-1933

Revealing the Hidden Story: Hajj Quarantine on Onrust Island 1911-1933

M. Bagas Kurniawan,^{1*} Abd Rahman Hamid,² Agus Mahfudin Setiawan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

✉ bagas.krnwn990@gmail.com

Article history:

Submitted: 02 Februari 2024

Accepted: 02 Juni 2024

Published: 23 Juni 2024

Abstrak: Pada masa kolonial di Indonesia, ibadah haji dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks yang berhubungan dengan politik, sosial, dan kesehatan. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur dan mengelola ibadah haji. Dari tahun 1911 hingga 1933, karantina di Pulau Onrust menjadi penting dalam mempersiapkan dan mengawasi jamaah sebelum perjalanan mereka ke Tanah Suci. Dengan menggunakan metode sejarah termasuk heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dokumen dan buku arsip digunakan. Temuan mengungkapkan Pulau Onrust berfungsi sebagai tempat karantina untuk mencegah penyebaran penyakit di kalangan jamaah haji dan dari luar negeri. Selain tindakan kesehatan, karantina juga mempunyai implikasi politik dan sosial. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkannya untuk memperkuat kontrol atas haji dan menjaga stabilitas di Hindia Belanda. Selain itu, karantina mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintahan kolonial dan berdampak pada keyakinan dan praktik keagamaan komunitas Muslim.

Kata Kunci: Karantina haji; Kisah Tersembunyi; Pulau Onrust

Abstract: During the colonial era in Indonesia, Hajj was influenced by complex political, social, and health-related factors. The government played a crucial role in regulating and managing the pilgrimage. From 1911 to 1933, quarantine on Pulau Onrust became pivotal in preparing and supervising pilgrims before their journey to the Holy Land. Employing historical methods including heuristic, source criticism, interpretation, and historiography, archival documents and books were utilized. Findings reveal Pulau Onrust served as a quarantine site to prevent the spread of diseases among pilgrims and from abroad. Beyond health measures, quarantine held political and social implications. Dutch colonial authorities utilized it to strengthen control over Hajj and maintain stability in the Dutch East Indies. Moreover, quarantine influenced public perception of colonial governance and impacted the Muslim community's religious beliefs and practices.

Keywords: Hajj Quarantine; hidden history; Onrust Island

P-ISSN 2798-196X E-ISSN 2798-3110 © 2024 author(s)

Published by UIN Raden Mas Said Surakarta, this is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

DOI: 10.22515/isnad.v5i01.9407

PENDAHULUAN

Jauh sebelum menjadi tempat karantina, Pulau Onrust (*Onrust Island*) berfungsi sebagai dermaga dan galangan kapal VOC-Belanda di Nusantara pada abad ke-17. Bahan bau kapalnya dimbil dari daerah sekitar Kota Batavia dari area pantai hingga daerah Pegunungan Priangan. Belanda mendirikan gudang-gudang penyimpanan barang dari kapal-kapal yang diperbaiki. Pada tahun 1656, dibangun sebuah benteng kecil serta diperkuat dan diperluas kembali pada tahun 1671 dengan membentuk tembok keliling berbentuk segi lima.¹ Belanda mempekerjakan budak-budak dari Batavia untuk membuat dan mereparasi kapal-kapal VOC di Onrust. Pada tahun 1694 tercatat ada 215 orang budak bekerja di pulau itu, sementara 953 budak dikerahkan untuk berbagai pekerjaan di Kota Batavia.²

Pada abad ke-18, Onrust menjadi tempat karantina pelaut yang mengidap penyakit menular sebelum memasuki kota Batavia. Ia menjadi tempat tinggal berbagai penduduk, termasuk tentara, pekerja pribumi, dokter, dan perawat.³ Pada awal abad ke-19, pemerintah mengembangkan Onrust menjadi kompleks barak besar sanatorium TBC dan tempat karantina orang-orang yang menderita penyakit menular di sekitar kota Batavia. Pemerintah membangun Stasiun Karantina Penyakit Menular di Pulau Onrust dan Pulau Cipir, sebagai bagian komitmen mereka setelah menandatangani Konvensi Kesehatan Internasional di Paris pada 3 Desember 1903. Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap epidemi penyakit tropis. Pembangunan Stasiun Karantina baru diputuskan tujuh tahun setelah kesepakatan internasional tersebut karena Belanda ingin membangun karantina dengan fasilitas bertaraf kelas satu, termasuk fasilitas penelitian, perawatan, ruang isolasi, dan obat-obatan, serta kebutuhan pendukung seperti dokter, staf medis, peralatan medis, asrama, dan rumah dokter berikut stafnya. Karantina di Pulau Onrust dan Pulau Cipir mampu menampung hingga 3.500 orang. Pulau Cipir dijadikan sebagai lokasi pemeriksaan awal, dengan menyediakan beberapa rumah pasien dan fasilitas rumah sakit.⁴

Orang-orang yang diperiksa dan menunjukkan hasil positif infeksi harus tinggal di Pulau Cipir, sedangkan yang negatif dibawa ke Karantina Pulau Onrust untuk observasi lebih lanjut. Di Pulau Onrust, terdapat 35 barak yang masing-masing mampu menampung 100 orang, serta sebuah rumah sakit. Proses pemeriksaan kesehatan di karantina ini sangat ketat. Kapal-kapal laut yang datang tidak diizinkan langsung menurunkan penumpang dan awak kapal di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapten kapal harus menjawab dua puluh pertanyaan dalam formulir yang diberikan oleh petugas syahbandar sebelum penumpang diizinkan turun. Pertanyaan tersebut mencakup pelabuhan mana saja yang disinggahi sebelum sampai di Batavia, apakah pelabuhan-pelabuhan tersebut

¹ Driman Surachmat, Idik Mutholib, and Candrian Attahiyat, *Sejarah Teluk Jakarta* (Jakarta: Dinas Museum & Sejarah DKI Jakarta, 1996), 68.

² Bondan Kanumoyoso, *Ommelanden: Oerkembangan Masyarakat Dan Ekonomi Di Luar Tembok Kota Batavia 1684-1740* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023), 49–51; 154.

³ Muhamad Abi Fadila, "Menilik Sejarah Lokal: Riwayat Pulau Onrust Tahun 1613-1883," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 12, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i1.9044>.

⁴ Surachmat, Mutholib, and Attahiyat, *Sejarah Teluk Jakarta*.

terinfeksi penyakit menular, apakah membawa penumpang jemaah haji atau emigran, adanya kasus penyakit menular di dalam kapal selama 21 hari terakhir, tindakan pencegahan tikus masuk ke kapal, dan apakah kapal telah dibersihkan dari tikus sebelum berangkat.

Pulau Onrust, salah satu dari gugusan pulau di Teluk Jakarta, terletak tidak jauh dari daratan sehingga mudah dijangkau dengan kapal nelayan atau armada air dari penyedia jasa penyeberangan. Sebagian besar orang di Jakarta mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa ada sebuah pulau yang dekat dari ibu kota ini kaya akan sejarah, baik kolonial maupun lokal. Nama Onrust diambil dari bahasa Belanda yang berarti "jalan terus" atau "sibuk" atau "tanpa istirahat," sesuai aktivitasnya di masa lalu.

Sejak dikelola oleh pemerintah setempat, pulau ini hanya diperbolehkan dihuni oleh dua keluarga yang sejak dahulu ditugaskan untuk menjaga Onrust. Kini, Pulau Onrust menjadi tujuan wisata sejarah populer bagi para pengunjung yang ingin melihat sisa-sisa bangunan kolonial Belanda dan mengenal lebih dalam tentang sejarah maritim Indonesia. Pulau ini memiliki museum kecil yang memamerkan artefak dan informasi mengenai masa lalu Pulau Onrust serta kegiatan perdagangan dan pembangunan kapal pada zaman kolonial.

Selain peradaban kolonial, Onrust juga menyimpan nilai sejarah peradaban Islam, salah satunya sebagai tempat transit para jemaah haji yang akan berangkat dan kembali dari Tanah Suci Makkah. Belanda khawatir akan adanya pemikiran baru dari jemaah haji Indonesia yang baru pulang dari Tanah Suci dan dipengaruhi oleh bangsa luar, terutama karena pengalaman kota Batavia yang pernah terjangkit penyakit menular. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuat peraturan yang mengharuskan para jemaah haji menjalani karantina dan pemeriksaan kesehatan sebelum tiba dari Makkah. Sejak tahun 1911, stasiun karantina di Pulau Onrust dan Pulau Cipir digunakan sebagai karantina haji pada musim haji, dan di luar musim haji, stasiun ini digunakan untuk pemeriksaan dan perawatan pasien yang terinfeksi penyakit menular lainnya. Karantina di kedua pulau ini terus berfungsi hingga 1960-an.⁵

Karantina haji di Pulau Onrust memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Pulau ini pernah berfungsi sebagai tempat karantina bagi para calon haji sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci, dengan fasilitas yang dibangun untuk memastikan kesehatan para calon haji dan mencegah penyebaran penyakit. Dengan demikian, tulisan ini memfokuskan meneliti peran Pulau Onrust menjadi bagian penting dari perjalanan ibadah haji, memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan jemaah haji Nusantara pada 1911-1933.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yang diawali dengan tahap pengumpulan sumber (heuristik), kemudian kritik sumber (internal dan eksternal), lalu interpretasi fakta, dan akhirnya penulisan sejarah (historiografi).⁶ *Pertama*, penulis mengumpulkan sumber dengan

⁵ Yira Candrian, Dianti, *Onrust Dan Sekitarnya, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017.

⁶ ABD Rahman Hamid and Muahammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2011); M. Dien Madjid, *Metode Sejarah Teori Dan Praktek*, 2021.

tingkatan yang paling kuat hingga paling lemah berdasarkan sifatnya, yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Sejarahwan harus mengumpulkan sumber-sumber tersebut secara menyeluruh dan teliti untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Peneliti juga melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber lisan, tulisan, dan benda (material). *Kedua*, kritik sumber melibatkan pemilihan dan verifikasi keaslian dan keakuratan sumber sejarah, diikuti dengan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang telah diverifikasi untuk membentuk satu kesatuan yang kohesif. *Ketiga*, interpretasi fakta sejarah secara objektif dan rasional. Yang terakhir adalah historiografi yakni menyusun fakta sejarah menjadi sebuah kisah secara kronologis dan kausalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Haji di Masa Kolonial

Perjalanan haji sering disebut *rihlah mubarakah* atau perjalanan yang penuh berkah dan berpusat di Mekkah al-Mukarramah. Oleh karena itu, perjalanan ke sana dikenal sebagai Rihlah Makkiyah, yang menunjukkan fokus utama menuju kota suci Makkah di mana Ka'bah berada. Selain Makkah, perjalanan ini juga mencakup kota-kota seperti Madinah dan Jeddah, serta tempat-tempat bersejarah lainnya di kawasan ini, yang secara kolektif dikenal sebagai Rihlah Hijaziyah. Kawasan Tanah Hijaz ini, yang mencakup kota-kota penting dalam sejarah Islam, memberikan dimensi spiritual dan historis yang mendalam bagi para jamaah haji. Mengunjungi berbagai situs bersejarah ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang sejarah Islam, tetapi juga tentang budayanya.⁷

Perjalanan haji ke Mekkah bukan hanya perjalanan secara fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam. Sejak persiapan awal, para jamaah merasakan peningkatan rasa kejamaah, merasakan kebersamaan dan solidaritas yang kuat dengan sesama jamaah selama persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Ketika mereka menyelesaikan seluruh rangkaian ritual haji, para jamaah mencapai tingkat keruhanian yang lebih tinggi. Gelar haji (untuk laki-laki) atau hajjah (untuk perempuan) yang mereka sandang setelah menuntaskan semua kewajiban haji, tidak hanya merupakan pengakuan atas pencapaian fisik, tetapi juga simbol transformasi spiritual yang mereka alami sepanjang perjalanan haji.

Pada awal abad ke-17 para diplomat dan pedagang Indonesia menjadi angkatan perintis haji, masing-masing dengan misi tersendiri ke Tanah Suci. Mereka menggunakan kesempatan beribadah haji untuk memperluas jaringan perdagangan atau menjalankan tugas diplomatik.⁸ Ibadah haji juga menarik penuntut ilmu, dengan Makkah dan Madinah sebagai pusat syiar Islam, yang memikat perhatian pelajar dari seluruh dunia. Ulama Nusantara seperti Syekh Yusuf al-Makassar pergi ke Tanah Suci untuk memperdalam pengetahuan agama dan membawa pulang

⁷ Henri Chambert-Loir, *Naik Haji Di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji, 1482-1964* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019); M Dien Madjid, *Berhaji Di Masa Kolonial* (Jakarta: Sejahtera, 2008).

⁸ Uswatun Hasanah and Agus Mahfudin Setiawan, "Jaringan Ulama: Penyebaran Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Nusantara" 2 (2022): 6–13. Hasanah, Uswatun, Agus Mahfudin Setiawan and Nabilla. "Jaringan Ulama: Penyebaran Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Nusantara." *Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 44-50. <https://doi.org/10.57251/ie.v2i2.380>

pengalaman yang memperkaya budaya dan pemikiran Islam di Nusantara.⁹ Keberangkatan mereka mencerminkan hubungan emosional dan spiritual yang kuat antara umat Muslim Indonesia dan pusat-pusat keilmuan dan spiritual Islam di Makkah dan Madinah.¹⁰



Gambar 1. Jemaah haji sedang menunggu giliran pemeriksaan barang bawaan
Sumber: ANRI Jakarta

Pada awalnya, masyarakat pribumi yang antusias untuk berhaji menghadapi kendala dengan kapal yang tersedia. Sebagian besar kapal yang bersandar di pelabuhan Nusantara adalah milik para saudagar dari India dan Arab yang datang untuk berdagang, bukan untuk mengangkut jemaah haji. Namun, kebijakan haji mulai diberlakukan ketika pemerintah kolonial Belanda merasa perlu untuk mengontrol situasi. Meskipun demikian, banyak dari mereka yang berhasil menunaikan haji kemudian menjadi pelopor pembaharu dalam bidang keagamaan. Mereka dengan berani mengeksplorasi sudut pandang baru terkait kebijakan kolonial Belanda yang sering kali dianggap merugikan masyarakat Nusantara, khususnya para calon jemaah haji di Batavia.

Dalam pemikiran Snouck,¹¹ orang Eropa harus berhati-hati ketika memandang eksistensi umat Muslim karena dianggap sebagai entitas yang bergerak yang dapat mengancam kedudukan kolonial. Setiap pejabat kolonial perlu waspada terhadap potensi politik Islam (*islam politiek*) karena jumlah umat Muslim yang besar dapat didistribusikan untuk mencanangkan kekuatan semesta menentang Belanda. Snouck menghimbau para pegawai Eropa, pengusaha Eropa, atau orang Eropa berlatar profesi lainnya untuk meninjau lebih dalam kebaikan yang ditunjukkan setiap Muslim. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan pemahaman mendalam terhadap dinamika

⁹ Abu Hamid, *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi Dan Pejuang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005); Chambert-Loir, *Naik Haji Di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji, 1482-1964*.

¹⁰ Arsip Nasional RI, "Arsip Daftar Barang Bawaan Jemaah Haji Yang Diwajibkan Belanda," 1960.

¹¹ Muhammad Irfai Muslim, "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan," *Jurnal Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2020): 51–66.

dan potensi politik yang ada di kalangan umat Muslim untuk mengantisipasi ancaman terhadap kekuasaan kolonial.¹²

Snouck menduga telah terjalin semacam kerjasama warga pribumi di Nusantara dengan yang berdiam di Mekkah.¹³ Waktu haji dianggap sebagai momen yang tepat untuk memperbaharui atau sebagai sarana bertukar informasi penting terkait dengan rencana pemerintahan Hindia Belanda atas Nusantara di masa depan. Pembicaraan yang terjalin di antara mereka dapat mempertebal sikap kebencian pada pemerintah Hindia Belanda. Warga yang telah melaksanakan haji dapat membawa pulang gagasan-gagasan atau aspirasi dari dunia Islam yang mungkin bertentangan dengan kebijakan kolonial, memperkuat semangat perlawanan dan rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan kolonial. Kondisi inilah yang ditakutkan pemerintah saat itu memegang kekuasaan penuh atas wilayah jajahannya. Karena itu jamaah haji yang ingin ke tanah suci dan setelah kepulangan harus diperiksa secara intensif melalui proses yang sangat ketat, atau yang terkenal dengan karantina haji.



**Gambar 2. Jemaah haji baru tiba di Dermaga Pulau Onrust
Sumber: ANRI Jakarta**

Pemerintah Hindia Belanda mengelola haji melalui dua departemen yang berbeda tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Minister van Buitenlandsche Zaken) bertanggung jawab terhadap pengelolaan haji karena pelaksanaannya dilakukan di luar Hindia Belanda. Menteri Tanah Jajahan (Minister van Kolonie) mengatur haji, karena para jama'ahnya berasal dari daerah jajahan, dan perannya penting dalam mengawasi keberangkatan dan kepulangan mereka. Kedua departemen ini bekerja sama menentukan kebijakan umum serta mengkoordinasikan pelaksanaan haji dengan

¹² Jajat Burhanudin, "Wim van Den Doel," SNOUCK; Biografi Ilmuwan Christiaan Snouck Hurgronje",
Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia 24, no. 3 (2023): 13.

¹³ A Ginanjar Sya'ban, *C. Snouck Hurgronje Dan Wajah Islamnya* (Depok: Sahifa, 2024).

pemerintah Turki Utsmani, Arab Hasyimiah, dan Arab Saudi. Kerjasama ini memastikan kelancaran ibadah haji bagi jama'ah dari Hindia Belanda serta penyelesaian berbagai masalah terkait.

Pelabuhan Tanjung Priok menjadi titik keberangkatan utama jamaah haji dari Jawa, Madura, dan beberapa daerah timur Nusantara. Sebelum tahun 1922, sekitar 75 hingga 80% dari jamaah haji berangkat melalui pelabuhan ini. Laporan tahun 1921 menunjukkan bahwa dari total 28.795 jamaah haji terdapat 23.665 orang memulai perjalanannya dari Tanjung Priok. Akses ke pelabuhan ini tidak mudah. Calon jamaah harus menggunakan kereta api dari Stasiun Kota Batavia lalu turun di Stasiun Tanjung Priok, atau menggunakan kapal KPM melalui jalur laut. Alternatif lain adalah menggunakan perahu nelayan yang melalui sungai atau kanal Ancol untuk mencapai Dermaga 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Pelabuhan Tanjung Priok menjadi tujuan utama perusahaan pelayaran dalam pengangkutan jamaah haji ke Makkah. Sejak abad ke-19 pelabuhan Batavia, Singapura, Padang, dan Penang sering digunakan sebagai embarkasi atau debarkasi haji. Selain perusahaan Kongsi Tiga yang kontraknya disepakati pemerintah untuk mengangkut jamaah haji, beberapa agen perusahaan pelayaran swasta milik Arab dan Inggris juga membantu pengangkutan jamaah haji.¹⁴

Pada tahun 1914-1918, Perang Dunia I berdampak besar terhadap interaksi global, terutama terhadap jamaah haji dari Hindia Belanda. Aktivitas perjalanan antar negara untuk perdagangan, pendidikan, penelitian, dan pelaksanaan ibadah haji terdampak signifikan. Hal ini terlihat dari menurunnya jamaah haji yang berasal dari Hindia Belanda. Selain itu kapal-kapal yang melakukan perjalanan berhenti beroperasi. Sehingga banyak jamaah haji dari Hindia Belanda tidak bisa pulang dan mengalami kesulitan selama Perang Dunia I.¹⁵

Pada tahun 1937, organisasi keagamaan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Partai Syarikat Islam memelopori pendirian Komite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (CPPHI) untuk merespons tantangan akibat campur tangan perusahaan pelayaran pemerintah dan swasta dalam mengatur kepergian dan kepulangan jamaah haji, yang dicatat dalam surat-menyurat pemerintah. Bahkan mereka mendirikan maskapai pelayaran, N.V Schevaart dan *Handel May (Indonesische)*, yang direspon baik oleh umat Islam di Nusantara.

Pengelolaan perjalanan jamaah haji oleh pemerintah mengalami penyempurnaan setiap tahun, sejak Resolusi 1825 hingga 1937.¹⁶ Awalnya, pemerintah enggan terlibat, namun faktor ekonomi dan politik internasional memaksa mereka terlibat dengan tujuan untuk menjaga reputasi internasional, memperkuat kewibawaan, dan mempertahankan kolonialisme di Nusantara. Pada abad ke-19, penanganan haji lebih berfokus pada pembatasan jumlah jamaah. Di bawah kekuasaan pemerintah, beribadah haji menjadi tantangan yang sulit, terutama bagi kaum Muslim yang tidak memiliki peran atau kedudukan sebagai ulama atau keluarga ulama. Warga di Jawa yang hendak

¹⁴ Akhmad Syaekhu Rakhman and Fahmi Hidayat, "Perjalanan Ibadah Haji Masyarakat Jawa Pada Masa Kolonial (1905–1942)," *WIKSA: Prosiding Pendidikan Sejarah UNINDRA* 1, no. 1 (2022): 146–70.

¹⁵ Frial Ramadhan Supratman, "Hajj and the Chaos of the Great War: Pilgrims of the Dutch East Indies in World War I (1914-1918)," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5, no. 2 (2020): 167–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jw.v5i2.8584>.

¹⁶ Rifqi Alkindi, "Identifikasi Bangunan Karantina Haji Di Pulau Rubiah Sabang," *Skripsi*, 2023, 1–64.

melaksanakan ibadah haji memulai upaya perjalanan mereka dengan menyimak informasi yang didapatkan melalui selebaran-selebaran dari para agen perjalanan. Langkah berikutnya yang harus diselesaikan oleh calon jamaah haji sebelum berangkat ke tanah suci adalah mengumpulkan informasi terkait persyaratan administrasi dan penyelesaian pendanaan untuk perjalanan ibadah haji. Calon jamaah haji diwajibkan mengikuti karantina sebelum ke Jeddah dan juga pada saat pulang. Jamaah dari Banten diantar oleh agen perjalanan sampai di stasiun kereta api Batavia. Proses ini menunjukkan pengaturan yang ketat untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan jemaah selama perjalanan.¹⁷

Tingginya tarif dan banyaknya persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda membuatnya semakin sulit untuk menunaikan ibadah tersebut. Hal itu disebabkan oleh kebijakan kolonial yang menetapkan persyaratan yang berat dan tarif yang mahal bagi calon jamaah haji.¹⁸ Kebijakan ini dianggap sebagai upaya pemerintah kolonial untuk menghambat akses kaum Muslim Nusantara ke luar negeri, karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas politik yang dijaga oleh Hindia Belanda. Banyaknya persyaratan dan tingginya tarif yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji bukanlah semata-mata untuk kepentingan finansial, melainkan juga merupakan strategi kolonial untuk mencegah masyarakat Nusantara mengakses budaya dan pengaruh luar yang dinilai sebagai ancaman terhadap stabilitas politik yang dijaga oleh Hindia Belanda.

Karantina Haji di Pulau Onrust

Karantina di Pulau Onrust dan Pulau Cipir diangkat sebagai solusi dalam menghadapi tantangan besar pada masa kolonial, yaitu penyebaran penyakit di antara para jamaah haji. Dengan mampu menampung hingga 3.500 orang, fasilitas karantina ini tidak hanya menjadi tempat pemeriksaan awal, tetapi juga memberikan perlindungan bagi mereka dari risiko tertular penyakit yang dapat menyebar dalam kelompok tersebut. Keberadaan karantina ini menandai komitmen pemerintah kolonial Belanda dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya dalam situasi yang membutuhkan perlindungan terhadap penyebaran penyakit tropis. Dengan menyediakan fasilitas seperti rumah sakit dan barak observasi, pemerintah bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat penyakit yang menular di tengah-tengah para jamaah haji.¹⁹

Karantina di Pulau Onrust dan Pulau Cipir adalah karantina pertama di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh pembangunan karantina di Pulau Rubiah di Sabang. Selanjutnya, pada tahun 1950, fasilitas karantina juga didirikan di Surabaya, Semarang, dan Cilacap. Pengelolaan karantina ini diatur oleh Quarantine Ordonantie staatblad no. 27 tahun 1911, di mana Karantina Pulau Onrust dan Karantina Pulau Rubiah termasuk dalam kategori Pelabuhan Karantina Kelas Satu.²⁰

¹⁷ Eka Yudha Wibowo, "Strategi Ekonomi Haji Di Hindia Belanda Awal Abad 19," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 4, no. 1 (2023): 77–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/isnad.v4i1.7430>.

¹⁸ Muslim, "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan."

¹⁹ Candrian, Dianti, *Onrust Dan Sekitarnya*.

²⁰ Candrian, Dianti.

Pada tahun 1912, Muhammadiyah mendirikan biro bantuan haji sebagai tanggapan terhadap karantina yang dianggap tidak manusiawi. Pada tahun 1922, perlindungan terhadap jamaah haji diperkuat dengan keputusan yang mengizinkan warga pribumi untuk mengatur layanan transportasi haji. Pada tahun 1926, para ulama berkumpul di Surabaya, kemudian mengirim delegasi ke Arab untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan haji. Pada tahun 1933, embarkasi di Pulau Onrust dipindahkan ke pelabuhan Tanjung Priok untuk meningkatkan aspek kemanusiaan perjalanan haji. Belanda mendirikan fasilitas serupa di Masjid Raya Ganting, Padang (Sumatera Barat), sebagai embarkasi pertama di Sumatera Tengah.²¹



Gambar 3. bekas barak karantina haji di Pulau Onrust
Sumber: Kurniawan, Hamid, Setiawan, 2023

Pada masa awal Perang Dunia II, pemerintah Belanda menggunakan Pulau Onrust sebagai kamp interniran bagi orang-orang Jerman yang ada di Indonesia, antara lain adalah Steifurs, bekas kapala administratur Pulau Onrust. Ketika Jepang berkuasa pada tahun 1942, warga negara Jerman yang ditahan di pulau tersebut dibebaskan dan sejak saat itu Onrust kurang berfungsi lagi dan pada akhirnya ditinggalkan. Kini, bangunan yang masih utuh adalah rumah dokter, penjara, rumah diesel, gedung bekas tempat registrasi haji dan bangunan pengawas pantai (rumah *keker*).²²

Kondisi Sosial dan Politik

Dinas Kebersihan dan Penyiraman yang didirikan oleh pemerintah setiap hari membersihkan kampung dan sungai. Pemerintah melarang warga membuang kotoran atau sampah di luar rumah sebelum diangkut oleh petugas kebersihan demi menjaga kebersihan kampung dan

²¹ Alkindi, "Identifikasi Bangunan Karantina Haji Di Pulau Rubiah Sabang."

²² Surachmat, Mutholib, and Attahiyat, *Sejarah Teluk Jakarta*.

mencegah munculnya lalat pembawa kolera. Pemerintah juga membangun fasilitas mandi dan pencucian bagi masyarakat serta memasang septictank untuk mengumpulkan kotoran manusia guna menghindari penyebaran penyakit. Pemerintah memperbaiki infrastruktur kampung dengan membangun jalan beraspal, selokan, memperluas sistem sumur air dalam, memperluas sistem air ledeng, serta menyediakan fasilitas pemandian umum, tempat pencucian, klinik masyarakat, dan vaksinasi. Proyek perumahan untuk pribumi yang kurang mampu lebih banyak dinikmati oleh masyarakat Eropa, karena harga rumahnya mahal. Upaya ini berhasil menurunkan kasus penyakit kolera sejak tahun 1920. Epideminya di Tanjung Priok, semula memiliki tingkat kematian tertinggi akibat kolera, berhasil dihentikan pada tahun 1927.²³

Pemerintah terus menghimbau penduduk Batavia untuk menjaga kesehatan dengan tidak membuang kotoran sembarangan dan tidak mandi di sungai, serta tidak minum air mentah. Wabah kolera biasanya muncul di musim panas, ketika sungai dangkal yang menyulitkan akses masyarakat terhadap air bersih dan menjaga kebersihan diri. Respon budaya masyarakat beragam. Orang Tionghoa di Batavia mengusir wabah dengan barongsai, karena mereka percaya bahwa setan penyebab kolera takut pada barongsai. Masyarakat Islam meminum air khusus yang telah disucikan oleh kyai untuk mencegah kolera. Masyarakat yang lain melakukan ritual pengusiran pageblug. Masyarakat meyakini bahwa wabah tersebut merupakan siksaan Tuhan. Banyak ulama terkena dampak wabah ini.

Bagi umat Islam, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib bagi setiap Muslim yang sudah mampu baik secara materi maupun non-materi. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, menunaikan ibadah haji bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga cara untuk menuntut ilmu, terutama bagi kaum *Jawah* dari Asia Tenggara. Sejak Islam pertama tiba di Nusantara, umat Islam telah melaksanakan haji, meskipun tidak ada catatan pasti tentang kedatangan pertama umat Islam Nusantara di Makkah. Sebagai Tanah Suci Islam, Islam menjadi pusat penting untuk mencari ilmu dan pengaruh, di mana para haji bertemu, belajar dari guru-guru yang sama, dan mendapatkan informasi tentang perkembangan dan gerakan di negara-negara muslim.

Jumlah jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Makkah berfluktuasi, karena berbagai faktor. Pada tahun 1900, jamaah haji sekitar 5.088 orang, lalu meningkat menjadi 9.644 orang pada tahun 1909, Puncaknya pada tahun 1910 yakni sebanyak 14.234 orang. Jumlah tersebut menurun pada tahun 1915 karena kondisi kehidupan yang sulit di Makkah, termasuk harga barang impor yang tinggi akibat Perang Dunia I (1914-1918).²⁴ Banyaknya umat Islam Indonesia berhaji dan menetap di Makkah mendorong pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan politik untuk mengatasi gerakan yang mengancam kekuasaannya. Pemerintah menyadari bahwa kebijakannya telah meningkatkan fanatisme yang dapat mengancam eksistensi politiknya. Pada awal abad ke-20, pemerintah menganggap politik Islam, khususnya Pan Islamisme dan nasionalisme, sebagai

²³ Ahmad Fauzan Baihaqi, "Pelayaran Angkutan Jamaah Haji di Hindia Belanda (Tahun 1911-1930)," *Buletin Al-Turas* 22, no. 1 (2016): 1–24, <https://doi.org/10.15408/bat.v22i1.2926>.

²⁴ Eka Nur Ramdhaniah, Putri Indah Sundari, and Anisa Wulan Sari, "Dampak Penanganan Epideminya Kolera Terhadap Kondisi Sosial Budaya Penduduk Batavia Tahun 1900-1920," *Historiography* 1, no. 3 (2021): 284, <https://doi.org/10.17977/um081v1i32021p284-301>.

ancaman yang harus diawasi secara ketat.²⁵ Kedua isu ini erat terkait dengan jamaah haji. Kebijakan politik haji lebih berfokus pada usaha pengawasan pengaruh gerakan tersebut untuk menjaga stabilitas pemerintahan kolonial di Indonesia. Gerakan Pan Islamisme mendapat pengawasan intensif sampai pada tahun 1924, ketika Khalifah Turki Utsmani digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk.²⁶ Jamaah haji yang dicurigai memiliki pengaruh politik dipantau guna mencegah perkembangan gerakan ini di Nusantara.²⁷

Politik haji merupakan bagian dari strategi politik Islam yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah ini menjalankan kebijakan khusus terhadap ibadah haji, dengan menganggap para jamaah haji sebagai potensi fanatik dan pemberontak. Upaya membatasi dan mempersulit pelaksanaan ibadah haji dilakukan dalam upaya untuk mengontrol aktivitas umat Islam di Hindia Belanda. Namun, ironisnya, jumlah jamaah haji terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan semangat yang tinggi di kalangan umat Islam Indonesia untuk menjalankan ibadah haji. Mereka percaya bahwa semakin sulit dan rumit prosedur haji yang mereka lalui, semakin besar pahala yang mereka peroleh dalam menjalankan ibadah tersebut.

Pemerintah melihat bahwa semakin banyak jamaah haji pulang dari Mekkah membawa ajaran ortodoks setelah sekian lama mereka bermukim di sana. Banyak perlawanan rakyat dipimpin oleh para haji. Itulah sebabnya pemerintah menganggap berhaji membuat penduduk pribumi semakin fanatik dan hal itu mengancam kedudukan mereka di Nusantara. Walhasil, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan guna membatasi dan mempersulit pelaksanaan haji, termasuk ordonansi haji dan ordonansi guru agama.

KESIMPULAN

Perjalanan haji di sangat sulit dilaksanakan pada masa kolonial. Hanya saudagar, ulama, dan kaum intelektual yang dapat dan mampu pergi ke Tanah Suci. Sebelum jamaah haji berangkat, mereka harus melengkapi semua administrasi dan menyiapkan barang bawaan sesuai peraturan pemerintah. Tarif keberangkatan mahal, sehingga mereka harus merogoh banyak koceknya. Selain untuk pembatasan, kebijakan tersenut juga dilandasi oleh kekhawatiran pemerintah terhadap situasi internalnya. Mereka khawatir kemudahan akses masyarakat Muslim pribumi ke tanah suci dapat memicu kesadaran tentang tindakan penjajahan mereka di Nusantara.

Tidak hanya sebelum keberangkatan, namun juga setelah kepulangan dari Tanah Suci, para haji Nusantara harus menjalani pemeriksaan dan interogasi yang ketat. Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial mendirikan tempat karantina haji di Pulau Onrust dan Pulau Cipir sebagai tahapan akhir sebelum para haji kembali ke daerahnya masing-masing. Pembangunan karantina haji di Pulau Onrust merupakan manifestasi dari kekhawatiran Pemerintah Hindia Belanda akan kemungkinan kecerdikan yang bisa terungkap serta pengaruh kaum intelektual Nusantara yang

²⁵ Abdul Somad, "Pemikiran Dan Pergerakan Pan Islamisme Di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20," *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 1, no. 1 (2015): 89–111, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v1i1.754>.

²⁶ Wibowo, "Strategi Ekonomi Haji Di Hindia Belanda Awal Abad 19."

²⁷ Baha'uddin, "Politik Etis Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Jawa Pada Awal Abad Ke-20," *Konferensi Nasional Sejarah*, no. November 2006 (2006): 14–17.

belajar di Tanah Suci. Pulau Onrust juga memiliki nilai sejarah yang penting dalam peradaban Islam di Nusantara, menjadi titik awal perkembangan peradaban kaum Muslimin di Indonesia dan digunakan sebagai tempat karantina jemaah haji yang menegaskan kedalaman nilai-nilai keagamaan dan sejarah bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkindi, Rifqi. "Identifikasi Bangunan Karantina Haji Di Pulau Rubiah Sabang." *Skripsi*, 2023, 1–64.
- Baha'uddin. "Politik Etis Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Jawa Pada Awal Abad Ke-20." *Konferensi Nasional Sejarah*, no. November 2006 (2006): 14–17.
- Burhanudin, Jajat. "Wim van Den Doel," SNOUCK; Biografi Ilmuwan Christiaan Snouck Hurgronje". *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 24, no. 3 (2023): 13.
- Candrian, Dianti, Yira. *Onrust Dan Sekitarnya. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017.
- Chambert-Loir, Henri. *Naik Haji Di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji, 1482-1964*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Fadila, Muhamad Abi. "Menilik Sejarah Lokal: Riwayat Pulau Onrust Tahun 1613-1883." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 12, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i1.9044>.
- Fauzan, Ahmad. "Pelayaran Angkutan Jamaah Haji Di Hindia Belanda (Tahun 1911-1930)." *Buletin Al-Turas* 22, no. 1 (2016): 1–24. <https://doi.org/10.15408/bat.v22i1.2926>.
- Hamid, ABD Rahman, and Muahammad Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Hamid, Abu. *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi Dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Hasanah, Uswatun, and Agus Mahfudin Setiawan. "Jaringan Ulama: Penyebaran Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Nusantara" 2 (2022): 6–13.
- Kanumoyoso, Bondan. *Ommelanden: Oerkembangan Masyarakat Dan Ekonomi Di Luar Tembok Kota Batavia 1684-1740*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023.
- Madjid, M. Dien. *Metode Sejarah Teori Dan Praktek*, 2021.
- Madjid, M Dien. *Berhaji Di Masa Kolonial*. Jakarta: Sejahtera, 2008.
- Muslim, Muhammad Irfai. "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan." *Jurnal Manajmen Dakwah* 6, no. 1 (2020): 51–66.
- Rakhman, Akhmad Syaekhu, and Fahmi Hidayat. "Perjalanan Ibadah Haji Masyarakat Jawa Pada Masa Kolonial (1905–1942)." *WIKSA: Prosiding Pendidikan Sejarah UNINDRA* 1, no. 1

MENGUNGKAP KISAH TERSEMBUNYI....

M. Bagas Kurniawan, Abd Rahman Hamid, Agus Mahfudin Setiawan

(2022): 146–70.

Ramdhaniah, Eka Nur, Putri Indah Sundari, and Anisa Wulan Sari. “Dampak Penanganan Epidemi Kolera Terhadap Kondisi Sosial Budaya Penduduk Batavia Tahun 1900-1920.” *Historiography* 1, no. 3 (2021): 284. <https://doi.org/10.17977/um081v1i32021p284-301>.

RI, Arsip Nasional. “Arsip Daftar Barang Bawaan Jemaah Haji Yang Diwajibkan Belanda,” 1960. Somad, Abdul. “Pemikiran Dan Pergerakan Pan Islamisme Di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20.” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 1, no. 1 (2015): 89–111. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v1i1.754>.

Supratman, Frial Ramadhan. “Hajj and the Chaos of the Great War: Pilgrims of the Dutch East Indies in World War I (1914-1918).” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5, no. 2 (2020): 167–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jw.v5i2.8584>.

Surachmat, Driman, Idik Mutholib, and Candrian Attahiyat. *Sejarah Teluk Jakarta*. Jakarta: Dinas Museum & Sejarah DKI Jakarta, 1996.

Sya’ban, A Ginanjar. *C. Snouck Hurgronje Dan Wajah Islamnya*. Depok: Sahifa, 2024.

Wibowo, Eka Yudha. “Strategi Ekonomi Haji Di Hindia Belanda Awal Abad 19.” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 4, no. 1 (2023): 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/isnad.v4i1.7430>.